

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bidang pariwisata di Indonesia mempunyai potensi sangat besar dan merupakan salah satu bidang yang memacu perekonomian di Indonesia. Potensi yang dimiliki pun beragam baik potensi fisik, sosial, maupun budaya. Potensi sumber daya alam dan budaya Indonesia yang berlimpah serta beranekaragam diberbagai daerah tentu memiliki keunikan dan ciri khas yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Indonesia (Yurika, 2019).

Berbeda dengan komoditi-komoditi ekonomi yang lain, pariwisata merupakan komoditi yang diproduksi melalui proses kolektif yang unik, sehingga melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang mendalam. Industri Pariwisata memiliki kemungkinan yang bagus karena banyak potensi obyek wisata yang menarik dan beranekaragam sehingga layak untuk dijual di pasar internasional. Pariwisata merupakan bidang ekonomi penting di Indonesia. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebesar 15,81 juta atau naik 12,61% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 14,04 juta kunjungan (Dewi, Basuki, & Indriani, 2019).

Tabel 1.1  
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia 2018 VS 2017

Tahun	Jumlah Wisatawan
2017	14.039.799
2018	15.810.305
Pertumbuhan (%)	12,61

Sumber: Data Pusat Statistik (Dewi, Basuki, & Indriani, 2019)

Pariwisata menempati urutan keempat dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data BPS tahun 2018, pariwisata memberikan devisa bagi negara sebesar 16.426 miliar dolar Amerika Serikat (Badan Pusat Statistik, 2018)

Tabel 1.2  
Peringkat Devisa Pariwisata Terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar Tahun 2015

Rank	2015	
	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
1	Minyak & gas bumi	18,552.10
2	Batu bara	15,943.00
3	Minyak kelapa sawit	15,385.20
4	Pariwisata	12,225.89
5	Pakaian jadi	7,371.90
6	Makanan olahan	6,456.30
7	Karet olahan	5,842.00
8	Alat listrik	5,644.80
9	Tekstil	4,996.00
10	Kayu olahan	3,815.80
11	Kertas dan barang dr kertas	3,605.50
12	Bahan kimia	2,807.60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa maksud dari kepariwisataan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin sehingga

muncul sebagai wujud dari kebutuhan dan interaksi setiap orang serta negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut sudah sangat jelas, bahwa pembangunan pariwisata memang ditujukan untuk masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan mampu bersaing serta melestarikan kebudayaan yang dimiliki. Hingga kini potensi wisata di berbagai daerah terus digali, dikembangkan, dan dipromosikan sehingga dapat memajukan perekonomian daerah dan negara dibidang pariwisata sekaligus dapat menjalankan fungsi dari otonomi daerah, yang mana setiap daerah harus mampu mengelola nilai-nilai kearifan lokal, sumber daya alam, dan kebudayaan daerah. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah bisa berupa potensi alam dan budaya yang didukung langsung dari sumber daya manusia yang terampil dan memadai dalam mengelola potensi daerah yang ada.

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menambah jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah, baik itu wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Pemerintah dapat melakukan pembangunan obyek wisata baik itu pengembangan dan perawatan berupa sarana serta prasarana yang dapat menunjang kegiatan pariwisata. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menjelaskan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan ke arah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

yang lebih baik meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka menciptakan nilai tambah sesuai yang diinginkan.<sup>2</sup> Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini daerah tujuan wisata telah melakukan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Provinsi Kepulauan Riau terdapat 5 Kabupaten dan 2 kota diantaranya Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Masing-masing Kabupaten/kota memiliki keunikan dan daya tarik wisata tersendiri. Dilihat dari letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara luar membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik wisata masing-masing (Kepriprov.go.id).

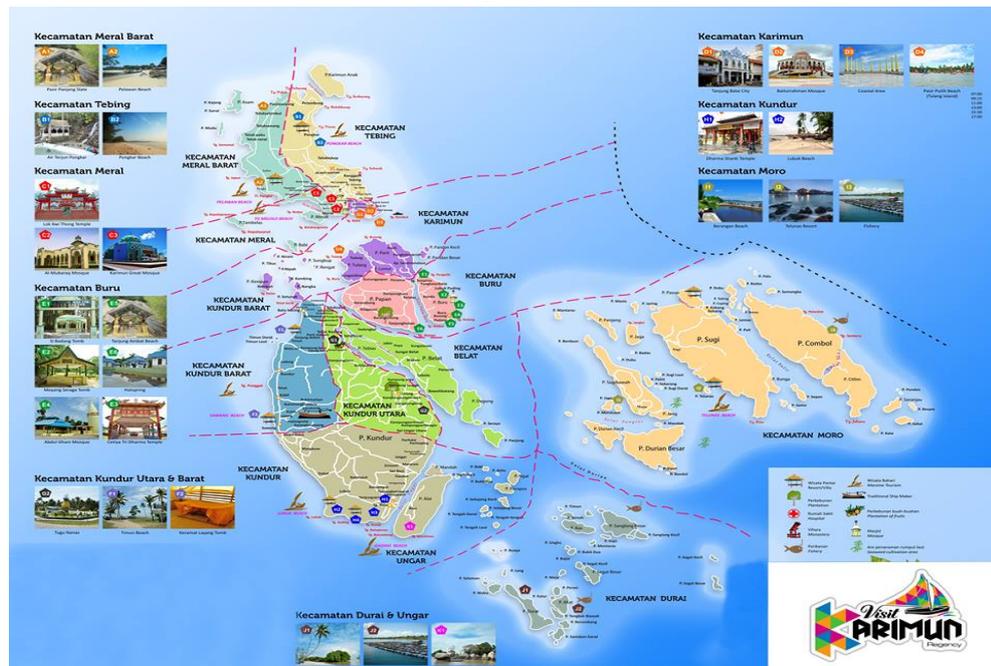
Kabupaten Karimun mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 29 kelurahan. Hampir setiap pulau di Kabupaten Karimun ini memiliki daya tarik wisata yang dapat dijadikan sumber pendapatan sekaligus sebagai lahan kerja bagi masyarakat. Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki daya tarik pariwisata yang indah serta di dukung oleh aksesibilitasnya yang tinggi. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal. Ditambah lagi dengan posisi Kabupaten

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura (Tiara & Darsiharjo, 2013)

Gambar 1.1  
Peta Wisata Kabupaten Karimun



Sumber: Data Dokumentasi Dinas Pariwisata

Berdasarkan data statistik tahun 2019, Kabupaten Karimun merupakan salah satu pintu masuk utama wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Adapun asal wisatawan yang datang ke Kabupaten Karimun berasal dari berbagai Negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Jerman, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Karimun pada tahun 2018 mencapai 84.718 Orang (Dewi, Basuki, & Indriani, 2019).

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun memiliki tupoksi untuk melakukan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Karimun. Namun dalam melaksanakan tupoksinya selalu

muncul berbagai macam masalah sehingga menghambat proses pengembangan obyek wisata yang ingin dilakukan Dinas Pariwisata.

Dalam melakukan penelitian ini tentu masih sangat erat kaitannya dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan obyek pariwisata yang telah diteliti oleh beberapa penulis terdahulu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Kurniawan (2017), yang berjudul “Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Kolam Air Panas Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru” yang mana peneliti menitik beratkan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam pengembangan Obyek wisata kolam air panas Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan pengembangan Obyek wisata kolam air panas. Hasil penelitian yang dilakukan Adi Kurniawan menunjukkan bahwa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan wisata berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana pendukung seperti gazebo-gazabo, kamar mandi, restorasi bangunan. Namun dalam melaksanakan upaya tersebut pemerintah kurang dalam hal membimbing dan memberi bimbingan kepada masyarakat. Bentuk pembinaan belum dilakukan secara sistematis dan berkala sehingga membuat masyarakat tidak siap dalam menjaga dan menjadi pelaku pariwisata di daerahnya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam pengembangan Obyek wisata di Kabupaten Karimun.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Karimun?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran Dinas Pariwisata dalam proses pengembangan Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Karimun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Karimun.
2. Mencari dan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran Dinas Pariwisata dalam proses pengembangan Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Karimun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan agar bisa menjadi referensi dibidang ilmu pemerintahan, terutama analisa terhadap peran Dinas Pariwisata serta faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Karimun. Selain itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian yang terkait dengan penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Karimun agar dapat mengembangkan, meningkatkan daya tarik wisatawan domestik dan non-domestik datang ke Kabupaten Karimun, serta dapat memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan tempat wisata, dan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Karimun.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini tentu masih sangat erat kaitannya dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan Obyek pariwisata yang telah diteliti oleh beberapa penulis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian sejenis, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan (2017), yang berjudul “Upaya Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karimun Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Kolam Air Panas Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru” yang mana peneliti menitik beratkan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam pengembangan Obyek wisata kolam air panas Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan pengembangan Obyek wisata kolam air panas. Hasil penelitian yang dilakukan Adi Kurniawan menunjukkan bahwa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan wisata berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana pendukung seperti gazebo-gazabo, kamar mandi, restorasi bangunan. Namun dalam melaksanakan upaya tersebut pemerintah kurang dalam hal membimbing dan memberi bimbingan kepada masyarakat. Bentuk pembinaan belum dilakukan secara sistematis dan berkala sehingga membuat masyarakat tidak siap dalam menjaga dan menjadi pelaku pariwisata di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riduan (2018), yang berjudul “Strategi pengembangan Obyek wisata pantai pelawan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan dan strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk menjadikan Pantai Pelawan sebagai Obyek wisata yang unggul di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menggambarkan bagaimana strategi pengembangan Obyek wisata Pantai Pelawan yang dilakukan. Kemudian

dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan interaksi bersama beberapa narasumber yang dianggap berkompeten, lalu melakukan proses pengolahan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Riduan dapat disimpulkan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun telah berupaya menyusun strategi namun terkendala masalah anggaran, peran dan perhatian Pemerintah Kabupaten Karimun sangat minim dalam pengembangan pariwisata dikarenakan strategi tidak didukung oleh ketersediaan anggaran daerah, strategi yang telah disusun dianggap belum menjadi agenda atau prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Karimun sedang fokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur mendasar. Saran yang diberikan oleh penelitian ini adalah perlu adanya terobosan dari Pemerintah Kabupaten Karimun melalui kebijakan investasi dengan harapan investor luar mau menanamkan modalnya, serta adanya hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perangkat Desa beserta masyarakat setempat sehingga pengembangan Pantai Pelawan menjadi Obyek wisata unggulan di Kabupaten Karimun.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkana (2014), yang berjudul “Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Karimun Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan strategi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kebudayaan Keseniaan

dan Pariwisata di Kabupaten Karimun dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata dan Masyarakat di Kabupaten Karimun karena populasinya terlalu banyak maka diambil 10% untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling (metode pemilihan dengan cara mengambil sampel-sampel tertentu). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, metode wawancara dan penyebaran angket. Hasil penelitian diketahui bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Karimun sangat menarik dan cukup potensial jika didukung oleh Pemerintah Daerah. Obyek wisata yang berada di Kabupaten Karimun terdiri dari Obyek wisata alam, Obyek wisata sejarah dan budaya tempat-tempat hiburan serta tempat belanja. Saat ini ada beberapa Obyek wisata tersebut yang belum dikelola dengan baik dan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Sehingga belum berdampak signifikan terhadap ekonomi, sosial masyarakat Kabupaten Karimun. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah memperhatikan pengembangan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum merata dan menyeluruh di setiap Obyek wisata. Karena dengan perkembangan Obyek wisata yang diikuti dengan pengelolaan yang baik serta pengenalan kepada masyarakat secara efektif dan efisien maka wisatawan yang berkunjung Obyek wisata meningkat, dan akan berdampak pada pendapatan yang bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Evawani Elysa Lubis (2012), yang berjudul “Strategi Promosi Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Kepulauan Riau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang strategi promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, terutama Bagian Promosi Dan Daya Tarik pariwisata Kepulauan Riau dalam rangka mengembangkan Obyek-Obyek wisata, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari promosi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan informan ditentukan secara purposive. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi promosi Seni dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dilakukan sesuai dengan misi pemerintahan Kabupaten Karimun yang sedang mengembangkan dan mempromosikan Obyek wisata agar meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional secara signifikan. Strategi promosi adalah acara pemasaran, publikasi, hubungan media dan pemasaran dari mulut ke mulut. Penerapan strategi ini tidak maksimal, disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi dan SDM yang kurang memiliki kompetensi untuk melakukannya. Faktor pendukung menerapkan strategi promosi adalah koordinasi dan hubungan yang baik antara pemerintahan dan lembaga publik seperti agen perjalanan, restoran, dan hotel. Itu media pendukung adalah surat kabar, media elektronik seperti Semenanjung Televisi (STV), dan radio lokal. Yang lainnya adalah *booklet*, *leaflet*, *benner*, komunikasi tatap muka dengan melakukan expo dan pameran.

Masih berkaitan dengan pengembangan Obyek wisata yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian yang sama dilakukan oleh Nurbaiti Usman Siam (2015), yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Obyek Wisata”. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran, seperti yang diketahui Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki potensi wisata laut yang sangat besar dan mempunyai letak geografis yang sangat strategis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Usman Siam ini menunjukkan bahwa sangatlah diperlukan peran dan campur tangan pemerintah dalam memberdayakan Obyek Wisata dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola Obyek Wisata, sehingga dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Tanpa di pungkiri pengembangan Obyek wisata juga membawa dampak positif di sektor perekonomian dan masyarakat yang tinggal di daerah destinasi wisata tersebut, serta dengan adanya pengembangan Obyek wisata ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata tersebut dalam pengelolaan Obyek wisata itu.

Terkait dengan pengembangan obyek wisata Ain Nurul Syafika (2019), yang berjudul “Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kawasan Pantai Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pantai, sehingga dapat membuat pengunjung yang

datang merasa nyaman, serta dapat meningkatkan pemasukan masyarakat setempat akibat ramainya wisatawan yang datang berkunjung. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Ain Nurul Syafika adalah perilaku dari masyarakat setempat sudah memahami akan pentingnya menjaga dan merawat Kawasan pantai namun, pemahaman dan perilaku yang digambarkan masyarakat setempat masih tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka lakukan dalam menjaga Kawasan pantai.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggriyani Yurika (2019), yang berjudul “Peran Aktor Terhadap Pengembangan Wisata Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan pola pikir masyarakat tentang pengembangan kawasan wisata Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggriyani Yurika yaitu, masyarakat Desa Pongkar mengalami perubahan pola pikir karena dorongan rasa ingin tahu dan ingin memahami serta memecahkan masalah. Dimana dalam bermusyawarah melibatkan Kades Desa Pongkar, RT serta masyarakat Desa Pongkar, sehingga hasil musyawarah tersebut terdapat saran serta pendapat dari masyarakat Desa Pongkar yang kemudian masyarakat mulai mengelola potensi wisata yang ada di Desa Pongkar.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dheski Shamberi (2020), yang berjudul “Potensi Pengembangan Coastal Area Sebagai Objek Wisata Di Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengembangan coastal area dalam meningkatkan sarana dan

prasarana serta potensi dan daya tarik wisata coastal area. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, diperoleh indeks prasarana sebesar 100% dengan kelas potensi yang sangat menunjang. Untuk potensi dan daya tarik dengan indeks 90,47% dengan kelas potensi yang menunjang. Sedangkan untuk indeks sarana sebesar 50% dengan kelas potensi yang kurang menunjang. Persentase untuk sarana dan prasarana dalam objek wisata ini terdapat fasilitas yang kurang memadai pada objek wisata coastal area, adapun dengan infrastruktur yang sangat mendukung. Sapa pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke coastal area, kita harus menciptakan suasana indah dan mempesona dimana saja.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dhani Akbar (2019), yang berjudul “Peran Dan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa jauh peran dari pemuda Desa Pongkar berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Dhani Akbar adalah keikutsertaan pemuda Desa Pongkar hanya sebatas pengelolaan dan perawatan objek wisata. Dengan minimnya peran yang diberikan kepada pemuda Desa Pongkar, maka gagasan ide-ide yang seharusnya hadir dari pemuda menjadi tidak ada. Pengembangan potensi wisata Desa Pongkar perlu adanya kerjasama sama dengan beberapa pihak seperti Akademisi, Pemerintah, Masyarakat, serta pihak Swasta untuk menjadikan desa pongkar sebagai lokasi pariwisata ternama di Kabupaten Karimun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Afrizal Zulkarnain (2019), yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Batu Limau Kecamatan Ungar Dalam Pengelolaan Pariwisata”. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta sebagai bahan informasi penyebab dari minimnya partisipasi masyarakat Desa Batu Limau dalam pengelolaan pariwisata di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan M. Afrizal Zulkarnain maka dapat disimpulkan, masyarakat desa yang mengharapkan bertambahnya ekonomi dengan adanya wisata menjadikan mau untuk berpartisipasi, dan kekecewaan yang timbul pada masyarakat nelayan menjadikan masyarakat nelayan kembali meletakkan jaring dan pampang di daerah wisata tersebut hal ini membuat kotor lingkungan dan merusak keindahan pariwisata, sehingga berdampak pada kurangnya wisatawan yang datang berkunjung.

Adapun kesamaan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang ada sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai Pengembangan Pariwisata terutama di bidang Pengembangan Obyek Wisata yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah pada daerahnya masing-masing. Sedangkan dari segi aspek perbedaannya antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis melakukan studi kasus penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Karimun tidak hanya itu saja, penulis juga melakukan penelitian mengenai bagaimana peran serta faktor penghambat dan pendukung Dinas Pariwisata dalam pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Karimun.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Peran Dinas Pariwisata**

#### **a. Pengertian Peran**

Definisi peran yang pernah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1981) yaitu kedudukan (status) seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan sebuah fungsi.

Poerwodaminta (1995) mengemukakan peran yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dilator belakang oleh suatu peristiwa atau kegiatan. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia peran dapat diartikan sebagai karakter dan kapasitas seseorang yang menjalankan tugas fungsinya. (Endarmoko, 2006)

Kesimpulan dari definisi dan konsep diatas adalah kegiatan seseorang yang memiliki posisi dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam masyarakat. Jika konsep diatas digabungkan dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan maka, definisi peran adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang di lakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam masyarakat.

#### **b. Peran Dinas Pariwisata**

Sondang P. Siagian (1992) mengemukakan pada hakikatnya pemerintah mempunyai fungsi dalam mengatur dan melayani masyarakat. Biasanya pemerintahan memiliki fungsi dalam

mengatur yaitu sebagai negara hukum, akan tetapi pemerintah juga memiliki fungsi untuk melayani yaitu sebagai negara kesejahteraan. Kesimpulannya pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur dan melayani masyarakatnya dalam suatu wilayah yang bertujuan untuk menciptakan aturan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Davey (1998) pernah menyebutkan pemerintah memiliki lima fungsi diantaranya; pertama, menyediakan layanan untuk masyarakat. Kedua, membuat dan menegakkan aturan dalam masyarakat. Ketiga, melakukan pembangunan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mampu menjadi wakil dari masyarakat yang berada diluar wilayahnya. Kelima, melakukan koordinasi dalam merencanakan, dan investor dalam pengembangan wilayah atau daerah.

Sondang P. Siagian (2000) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pemerintah memainkan peran yang sangat dominan dalam pembangunan. Berikut adalah uraian dari peran tersebut:

- 1) Stabilisator, Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain; kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif,

melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

- 2) Inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.
- 3) Modernisator, pemerintah harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan handal dalam berbagai hal.
- 4) Pelopor, pemerintah dituntut untuk mampu contoh yang baik bagi masyarakatnya.
- 5) Pelaksana sendiri, pemerintah dalam hal ini dituntut untuk mampu melaksanakan segala urusan.

Blakely pernah menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai wirausaha yaitu pemerintah harus mampu membuat usaha demi meningkat pendapatan asli daerahnya, koordinator yaitu pemerintah harus mampu melakukan koordinasi yang baik dengan segala sektor baik swasta maupun masyarakat, fasilitator yaitu pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan swasta, dan stimulator yaitu pemerintah mampu memberikan stimulus kepada masyarakat dan investor yang menanamkan modal di daerahnya (Kuncoro, 2004).

Dasar pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019<sup>3</sup> tentang organisasi perangkat daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dari itu dibentuklah Dinas Pariwisata meneruskan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai peran dalam menjalankan tugas untuk mengelola pariwisata, seni dan budaya pada suatu daerah. Serta mampu mengajak masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di daerahnya.

I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta (2019), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- 1) Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk motivasi yang dapat pemerintah berikan adalah

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

melakukan sosialisasi dan promosi wisata, pelatihan pengelolaan usaha wisata, memberikan kemudahan kepada investor dalam menanam modal di bidang pariwisata sampai dengan *stimulant* bagi usaha wisata berbasis masyarakat (Simamora & Sinaga, 2016).

- 2) Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata. Usaha yang dapat dibuat pemerintah yaitu membangun infrastruktur penunjang pariwisata (Simamora & Sinaga, 2016).
- 3) Dinamisator, keberlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Sebagai upaya dinaminasi antar *stakeholder* pengembangan pariwisata adalah dengan melakukan berbagai hal terkait dengan kerjasama antar sektor, baik sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya dapat diwujudkan melalui berbagai kesempatan dialog mengenai

perkembangan pariwisata dengan pihak-pihak tersebut (Simamora & Sinaga, 2016).

Menurut Hari Prasetyo (2014) peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian obyek wisata diwujudkan dengan peran regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian obyek wisata melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada seluruh stakeholder sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan
2. Dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan dan pelestarian untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah.
3. Fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian obyek wisata untuk menjadi jembatan dari berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak sebagai pemberi pelatihan kepada masyarakat, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Oka A. Yoeti (2001) menyebutkan terdapat ada tiga hal penting yang dapat mempengaruhi, kenapa sangat perlu organisasi pariwisata, yaitu:

- 1) Terdapat persebaran pariwisata dari pusat-pusat pariwisata yang menyebabkan ketidak siapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- 2) Menambah keperluan daerah, usaha pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- 3) Kehendak setiap orang untuk melakukan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

Organisasi Pariwisata dimaksud adalah Dinas Pariwisata yang memainkan peran penting, dalam melakukan koordinasi di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

Menurut Burkard dan Medik dalam Oka A. Yoeti (2001) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata diantaranya adalah:

- 1) Membuat koordinasi untuk melaksanakan strategi pengembangan dan pemasaran wisata yang melibatkan pihak terkait dengan kegiatan kepariwisataan di daerah itu.
- 2) Menjadi wakil dalam mengurus kepentingan daerah pada saat pertemuan-pertemuan pengembangan pariwisata di tingkat nasional maupun intrnasional.
- 3) Mempercepat pembangunan dalam segi fasilitas dan kualitas pelayanan pariwisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang datang dari bermacam-macam segmen pasar.
- 4) Membuat system perencanaan pemasaran dalam bentuk paket-paket wisata yang sangat menarik wisatawan untuk datang berkunjung, serta mnciptakan kualitas pelayanan dan menyebarluaskan informasi wisata secara bertahap.

Dinas Pariwisata daerah merupakan organisasi yang ideal dalam Menyusun Rencana Induk Pengemangan Pariwisata Daerah sehingga bisa dijadikan panduan dalam melakukan pengembangan dan pemasaran pariwisata di daerah agar banyak wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut.

Oka A. Yoeti (2001) dalam bukunya menyebutkan, organisasi atau dinas pariwisata mempunyai wewenang yang besar

untuk melakukan pengembangan pariwisata di daerahnya serta mampu menjalankan kebijakan yang dapat memberi ke untungan bagi daerahnya sesuai dengan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari dinas pariwisata adalah:

- 1) Memberi kepuasan pada wisatawan karena memiliki fasilitas dan potensi wisata yang sangat memadai.
- 2) Berkoordinasi dengan berbagai macam pengusaha wisata, dan lembaga/instansi yang ada untuk mengembangkan industri wisata di daerahnya.
- 3) Mensosialisasikan maksud dan tujuan dari pariwisata pada seleruh masyarakat, agar masyarakat menegrti akan baik dan buruknya dalam melakukan pengembangan wisata menjadi sebuah industri wisata.
- 4) Melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap produk pariwisata serta melakukan pengembangan terhadap produk pariwisata agar dapat bersaing dengan pasar di masa depan.
- 5) Memberikan seluruh kebutuhan dan kperluan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata.
- 6) Menyusun sebuah kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata sesuai hasil penelitian yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014<sup>4</sup> yang membahas tentang pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

suatu tingkat daerah. Sama halnya dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melakukan tugas pemerintah daerah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Secara spesifik yaitu memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun mencakup pembuat sebuah kebijakan dan peraturan sebagai acuan dan pedoman seluruh stakeholder agar dapat menjadi instrument dalam mengatur segala kegiatan pengembangan (regulator), pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai *stakeholder* pariwisata (dinamisor).

c. Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pengoptimalan Peran Pemerintah

1) Adanya Anggaran

Untuk menjalankan perannya pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan finansial untuk menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Anggaran adalah sebuah perencanaan yang disusun oleh lembaga dan dinyatakan oleh satuan moneter serta berlaku pada jangka waktu panjang dan pendek (Wahyudi & Purwantoro, 2005).

Peranan dari anggaran sangat strategis dan menonjol dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang, serta dapat membantu membuat sebuah keputusan rencana pembangunan, memantapkan pengeluaran di waktu yang akan datang, serta bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kerja. Prinsip tersebutlah yang menekankan dalam mengelola anggaran keuangan yang menjadi isu penting oleh pemerintah daerah (Wahyudi & Purwantoro, 2005).

Ketersedian anggaran menjadi sangat penting bagi Dinas Pariwisata. Oleh sebab itu anggaran harus dikelola dengan beberapa prinsip (Rosyada, 2003), sebagai berikut:

- a) Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengelola anggaran.
- b) Akuntabilitas yaitu bisa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat.
- c) *Value For money* yaitu mampu untuk mengimplementasikan anggaran yang digunakan dengan beberapa prinsip yang dapat bermanfaat.

2) Ketersediaan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana adalah modal utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun sarana dan prasarana dapat optimal atau tidak sehingga dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Sebab itu pemerintah dituntut untuk menjaga dan merawat yang telah tersedia (Simamora & Sinaga, 2016).

3) Kemitraan (*Partnership*)

Pemerintah menggunakan prinsip yaitu *good governance* merupakan sebuah ide dan nilai dalam membuat pola ikatan pemerintahan, swasta, dan masyarakat Partisipasi masyarakat (*Participation*) (Simamora & Sinaga, 2016).

Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Karena perlu adanya kesadaran masyarakat untuk ambil andil dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Maka partisipasi masyarakat menjadi sorotan penting sebagai sasaran dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Rosyada, 2003).

## 2. Pengembangan Obyek Wisata

### a. Arti dari Pengembangan

Tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan arti dari pengembangan yaitu, sebuah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kaidah-kaidah teori yang kemudian digunakan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat dari sebuah teknologi sehingga tercipta sebuah teknologi yang terbaru secara bertahap.<sup>5</sup>

Seels & Richey dalam buku Alim Sumarsono (2012) menjelaskan bahwa pengembangan adalah proses mengartikan dan menjelaskan sebuah rancangan yang lebih spesifik ke dalam bentuk nyata. Secara spesifik pengembangan dapat diartikan sebagai proses yang akan menghasilkan bahan untuk pembelajaran. Namun Tessmer dan Richey dalam buku Alim Sumarsono (2012) sebuah proses pengembangan selalu memusatkan perhatian tidak hanya pada sebuah analisis dari sebuah kebutuhan, dan juga isu-isu analisis awal sampai akhir. Tujuan adanya pengembangan adalah untuk menghasilkan sebuah produk sesuai temuan di lapangan.

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

b. Pariwisata

Kalimat pariwisata terdiri dari kata pari dan wisata, yang mana pari itu adalah banyak dan wisata adalah perjalanan. Jadi pariwisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan berulang kali. Dalam padanan Bahasa Indonesia sering disebut dengan *tourism* sedangkan dalam Bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *World Tourism Organization* (WTO) sering didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang sering dilakukan orang-orang untuk mengadakan sebuah perjalanan dan meninggalkan lingkungan yang biasanya yang tidak lebih dari satu tahun (Muljadi & Warman, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi ataupun tamasya yang mengunjungi suatu tempat atau daerah yang bersifat hanya sementara.

c. Obyek wisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009<sup>6</sup> menjelaskan bahwa obyek wisata merupakan seluruh tempat atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Biasanya kegiatan wisata merupakan sebuah kegiatan yang dapat memberikan respon menyenangkan dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

mampu memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Jadi, sebuah obyek wisata harus mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Namun M. Ngafenan dalam Karyono (1997) menyebutkan sebuah obyek wisata itu harus dapat menciptakan daya tarik terhadap wisatawan agar mau mengunjungi obyek tersebut.

Berdasarkan definisi di atas Obyek wisata merupakan suatu tempat atau daerah dimana mempunyai sesuatu yang bisa dinikmati dari segi keindahan, keunikan atau sebagainya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan.

#### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual berfungsi sebagai penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pariwisata adalah suatu tugas atau perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam pengelolaan dan pengembangan Obyek pariwisata yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan Obyek pariwisata yang ada di daerah. Dengan berperan sebagai regulator, motivator, fasilitator dan dinamisator.
2. Pengembangan Obyek Wisata adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki

suatu tempat atau wilayah yang mempunyai sesuatu yang bisa dinikmati dari segi keindahan dan keunikan menjadi lebih bermanfaat dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan ketertarikan pengunjung dan wisatawan. Secara spesifik adalah pembentukan regulasi atau peraturan-peraturan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata, serta usaha strategi pemasaran pariwisata.

## **H. Definisi Operasional**

Dalam penelitian adalah unsure penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

### **1. Peran Dinas Pariwisata**

Peran Dinas Pariwisata diukur dari kinerja dan program-program dari Dinas Pariwisata, sesuai dengan yang diungkapkan Pitana dan Gayatri (2019) serta Prasetyo (2014) yang terbagi menjadi empat yaitu diantaranya:

#### **a. Regulator**

- 1) Pembentukan peraturan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata.

b. Motivator

- 1) Memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan usaha atau izin mendirikan bangunan.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempromosikan obyek wisata.
- 3) Memberikan dorongan bagi usaha wisata yang berbasis masyarakat.

c. Fasilitator

- 1) Mengadakan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terkait sadar wisata dan lainnya.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan.
- 3) Memberikan informasi wisata kepada pelaku usaha pariwisata agar bisa mengetahui terkait potensi ekonomi wisata dengan cara mempromosikan obyek wisata yang terdapat di wilayahnya.

c. Dinamisator

- 1) Melaksanakan dialog dengan sektor swasta.
- 2) Mengadakan pertemuan dengan bagian pemerintahan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata yaitu dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga.

2. Faktor-Faktor Pengoptimalan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Dalam Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Karimun.

a. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam pengembangan digunakan untuk:

- 1) Dibutuhkan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di obyek wisata.
- 2) Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat dan pihak swasta yang menjadi pelaku usaha wisata.

b. Ketersediaan Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasaran sangat dibutuhkan untuk:

- 1) Memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses obyek wisata.
- 2) Meningkatkan dayatarik untuk investor agar investor mau menanamkan modal untuk usaha pariwisata.

c. Kemitraan

Kemitraan sangat dibutuhkan dalam pengembangan obyek wisata karena dapat memberikan manfaat seperti:

- 1) Meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan masyarakat sekita obyek wisata, dan dapat menurunkan jumlah pengangguran.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat disekitar obyek wisata, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
  - 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Peran Serta Masyarakat

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata sebagai berikut:

- 1) Setiap masyarakat menjadi bagian penting dalam proses identifikasi, perencanaan pelaksanaan dalam pengembangan pariwisata dan evaluasi untuk mengambil keputusan dalam hal pengembangan obyek wisata

## **I. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metode dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kedalaman penjelasan atas suatu permasalahan atau fenomena sosial tertentu. Pada umumnya pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan ketika kemunculan masalah penelitian berasal dari realitas empiris yang diidentifikasi oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif adalah pendekatan penelitian yang menekankan kedalaman penjelasan dari data-data yang terkumpul yang berupa kata-kata atau gambar. Data yang terkumpul tersebut

dianalisa dan selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2017).

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Karimun sebagai pengelola dan penatalaksana secara umum, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun yang memiliki peran lebih kepada aspek fasilitasi dan regulasi.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Ada dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Yaitu data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yaitu pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Pariwisata tentunya mampu menjelaskan dan menggambarkan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Karimun.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung seperti video, foto-foto, artikel, berita di media cetak maupun elektronik, dan jurnal yang mencatat keadaan konsep penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian seperti statement pemerintah daerah, dokumen Negara/pemerintah kabupaten, dan

lain-lain. Adapun contoh data sekunder yang diperoleh dari dokumen Negara atau Pemerintah Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan kepariwisataan, Buku Profil Kabupaten Karimun, Data Statistik kepariwisataan lokal maupun mancanegara dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian. Individu manusia yang menjadi sampel sumber data disebut informan, penentuan informan dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan yang akan diwawancarai yaitu, 1). Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun yaitu, Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan staf-

staf yang terkait, 2). Swasta, yaitu Pelaku usaha pariwisata seperti Hotel, Restoran, Transportasi dan Travel wisata, 3). Masyarakat yaitu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan kelompok usaha masyarakat dalam bidang pariwisata.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian yang diambil dari pemerintah Kabupaten Karimun beserta aparatnya SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Balai Budaya Karimun, Komunitas Masyarakat, serta website dan media massa.

## **5. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam studi penelitian ini proses analisis data disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yaitu: dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalan dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

2. Penyajian data dan klasifikasi data, penyajian data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa cukup. Penyajian data dilakukan terhadap keabsahan data tersebut, keterkaitan dengan data lainnya, dan kesesuaian dengan tema penulisan, klasifikasi data yang dilakukan dengan cara membagi data-data ke dalam kategori teori atau bukan.
3. Interpretasi data, berupa penafsiran-penafsiran terhadap apa yang tersirat di dalam rangkaian data yang disajikan, kemudian mencari pola-pola hubungan dan keterkaitan dengan konsep atau fenomena satu sama lain. Untuk itu, dalam tahap ini peneliti menghubungkan data-data yang telah tersaji dengan bekal teori yang dipakai dalam penelitian ini.
4. Penyimpulan data, dilakukan dengan membuat kesimpulan terhadap penafsiran data.